

Implementasi *Good Governance* Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ko`Mara Kecamatan Polombangkeng Utara

Implementation of Good Governance for Community Welfare in Ko`Mara Village, North Polombangkeng District

Sulfianna*, Sobirin

*Email: revianastmi@gmail.com

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Sawerigading Makassar

Diterima: 25 Agustus 2022 / Disetujui: 30 Desember 2022

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan informasi lebih lanjut tentang partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan dalam mewujudkan good governance di Desa Ko`mara Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar dan untuk mengetahui dan mendapatkan informasi lebih lanjut tentang penerapan/pelaksanaan tata Kelola good governance dalam pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Ko`mara Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar. Metode penelitian kualitatif terdiri dari menganalisis perkembangan dan mendeskripsikan serta memberikan gambaran terhadap fokus penelitian antara partisipasi masyarakat dan peran good governance terhadap pembangunan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data secara wawancara, dan pengamatan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada responden di Lapangan. Hasil penilaian dari evaluasi bahwa partisipasi atau keterlibatan masyarakat dan peran good governance terhadap pembangunan belum berhasil secara optimal dengan penilaian menggunakan indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian tidak sesuai yang diharapkan yang menjadi tujuan organisasi.

Kata Kunci: Partisipasi, Peran *Good Governance*

ABSTRACT

The purposes of this study were (1) to find out and get more information about community participation in development planning in realizing good governance in Ko`mara Village, North Polombangkeng District, Takalar Regency and (2) to find out and get more information about the implementation/implementation of governance of good governance in the development of community welfare in Ko`mara Village, North Polombangkeng District, Takalar Regency. Qualitative research methods consist of analyzing developments and describing and providing an overview of the research focus between community participation and the role of good governance in development. This study uses data collection techniques by interview, and observation by asking a number of questions to respondents in the field. The results of the evaluation of the evaluation that community participation or involvement and the role of good governance in development have not been optimally successful with an assessment using the indicators used in the research not as expected which is the goal of the organization.

Keywords: Participation, the Role of Good Governance



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat tingkat kehidupan masyarakat yang lebih baik atau kesejahteraan sosial. Indonesia mencakup berbagai tindakan yang pada saat ini dirasakan masih sangat dilakukan manusia untuk mencapai memprihatinkan banyaknya masyarakat

yang belum mendapatkan kesejahteraan yang layak untuk keberlangsungan hidupnya (Kuncoro, 2015). Daerah diberi wewenang melaksanakan urusan rumah tangganya berdasarkan Undang-undang sesuai penerapan otonomi telah membuka peluang bagi daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi guna mengimplementasikan makna otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab (Maleke, 2019).

Good governance tidak dapat terwujud disebabkan berbagai hal seperti sistem kekuasaan yang tersentralisir, autokratik dengan birokrasi yang tidak efisien, institusi hukum, birokrasi dan lembaga pelayanan publik oleh kepentingan elit dan penguasa tertentu yang mendorong munculnya praktik korupsi dan lemahnya akuntabilitas publik. Kompetensi pengetahuan dan keterampilan para pejabat di berbagai jabatan publik dan politik amat rendah serta tidak adanya partisipasi dan organisasi masyarakat cukup kuat dalam proses pembangunan (Nasution, 2020).

Good governance menurut UNDP bahwa economic governance meliputi proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi aktivitas ekonomi di dalam negeri antara penyelenggara ekonomi

(Duaji, 2012; Umar, 2011). Political governance adalah proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan dan administrative governance adalah sistem implementasi proses kebijakan. Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dapat diwujudkan dengan salah satu turunan operasional dari good governance yaitu multi-stakeholder processes atau forum lintas pelaku yang menjadi inti dari multi-stakeholder adalah adanya pemerataan, keadilan, prinsip demokrasi dan partisipasi dari seluruh pihak (Apriana & Patubasai, 2021).

Dimana dalam menciptakan good governance melalui multi-stakeholder, pihak pemerintah, swasta serta masyarakat harus saling menopang dan menjalankan fungsinya dengan baik. UU No.25 Tahun 2004 menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan bersifat bottom up yang menekankan partisipasi dari banyak pihak, sehingga pembangunan dapat dirasakan oleh banyak pihak seperti masyarakat, sektor swasta dan pemerintah (Hendrawati & Pramudianti, 2020). Keterlibatan dari banyak pihak dalam perencanaan pembangunan di daerah dapat diwujudkan melalui suatu Perencanaan Pembangunan adalah forum antarpelaku dalam rangka

menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.

Kecamatan Polombangkeng Utara adalah salah satu Kecamatan yang telah melaksanakan UU No. 25 Tahun 2004 Tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, good governance yang merupakan wacana mengiringi gerakan reformasi seringkali dikaitkan dengan tuntutan akan pengelolaan pemerintah yang profesional, akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pemerintahan yang bersih dari KKN adalah bagian penting dari pembangunan demokrasi, hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Idealnya dalam suatu pemerintahan yang baik adalah pemerintahan tersebut menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal yaitu melaksanakan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Implementasi good governance dalam penyelenggaraan otonomi daerah diterapkan melalui efektivitas penyelenggaraan pelayanan yakni penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai salah satu bentuk partisipasi publik untuk mengukur kualitas pelayanan publik. Dalam literatur ilmu politik, partisipasi

publik merupakan salah satu indikator penting ciri-ciri eksistensi pemerintahan yang demokratis (Zakiyah, 2018; Suryadi & Sufi, 2019). Pelayanan sebagai salah satu fungsi pemerintah, pada tingkat operasionalnya harus dapat melindungi dan memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Memenuhi dan melindungi tuntutan kebutuhan masyarakat sebagai bagian dari wujud pelayanan dimaksudkan agar masyarakat dapat terpuaskan.

Pentingnya partisipasi publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik juga memperoleh momentum yang tepat seiring dengan munculnya era otoda yang memberikan keleluasaan lebih besar kepada daerah untuk merancang dan menentukan sendiri jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip good governance merupakan landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis. Tata pemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis dan efektif sesuai dengan cita-cita terbentuknya suatu masyarakat.

Pelayanan masyarakat di Desa Ko`mara Kecamatan Polombangkeng

Utara Kabupaten Takalar bisa dikatakan baik (profesionalisme) masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan dan dengan prosedur yang tidak panjang, biaya murah, waktu cepat dan hampir tidak ada keluhan yang diberikan kepadanya. Kondisi tersebut dapat terwujud bilamana organisasi publik didukung oleh SDM yang mampu baik dari kualitas maupun kuantitas, disamping juga adanya sumber daya peralatan dan sumber daya keuangan yang memadai.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan informasi lebih lanjut tentang partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan dalam mewujudkan good governance di Desa Ko`mara Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar dan untuk mengetahui dan mendapatkan informasi lebih lanjut tentang penerapan/pelaksanaan tata Kelola good governance dalam pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Ko`mara Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar.

B. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian di Desa Ko`mara Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar dipilih sebagai lokasi penelitian karena sangat mendukung program pelayanan, terutama kita dapat

melihat dan merasakan bentuk pelayanan yang secara langsung bersentuhan dengan lapisan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan atau menganalisis terhadap objek penelitian melalui pelayanan terkait dengan implementasi good governance terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Ko`mara Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar.

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung untuk mendapatkan data yang dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang disusun secara terbuka dan angket dan kemudian dibagikan kepada responden dengan berbagai pilihan jawaban, sedangkan data sekunder adalah data yang tersedia dan dapat diperoleh dari dokumentasi, publikasi resmi dan buku-buku lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah pegawai Kecamatan sebanyak 8 orang dan masyarakat setempat sebanyak 40 orang. Jadi jumlah instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah sebanyak 48 orang. Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan cara yaitu (1) observasi yaitu teknik yang

dipergunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan melalui pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti dan (2) wawancara yaitu teknik untuk memperoleh informasi secara mendalam guna melengkapi data observasi dan dokumentasi yaitu untuk mendapatkan data sekunder dari berbagai instansi terhadap apa yang dibutuhkan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Partisipasi Masyarakat Terhadap Perencanaan Pembangunan

Masyarakat menilai pelaksanaan pembangunan belum secara langsung dapat dikatakan optimal karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Masyarakat mengetahui segala bentuk permasalahan yang ada, maka diperlukan adanya kesadaran masyarakat agar kiranya bersedia turut serta berpartisipasi terhadap pembangunan di Desa Ko`mara Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar. Kesadaran yang dimiliki sangat mempengaruhi pencapaian tujuan, adanya permasalahan yang menimbulkan kerusakan. Apabila dikaitkan dengan jawaban pada variabel partisipasi masyarakat dengan keberhasilan pembangunan, jelas terlihat bahwa didalamnya terdapat korelasi antara variabel bebas dengan variabel keberhasilan.

Bentuk partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di Desa Ko`mara Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar yaitu untuk mencapai keberhasilan pembangunan dilakukan untuk membuat atau membangun sesuatu bentuk yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, yang berupa prasarana perhubungan, prasarana sosial, prasarana ekonomi dan prasarana pemasaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang menjadi responden dalam penelitian di Desa Ko`mara Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar yang menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan maka dari itu diperlukan adanya kesadaran masyarakat terhadap pembangunan yang diberikan dalam bentuk partisipasi dengan langkah mencapai tujuan yaitu adanya hubungan kerja sama antara seseorang dengan beberapa orang dalam suatu wilayah sehingga dengan adanya suatu perubahan maka masyarakat merasa senang terhadap apa yang menjadi keinginannya. Partisipasi masyarakat yang dilakukan secara tidak langsung adalah (1) tingkat kontribusi pemikiran, (2) tingkat kontribusi tenaga, (3) peran Masyarakat dalam bermusyawarah, (4) memelihara

dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan dan (5) memberikan sumbangan materi (dana).

2. Penerapan *Good Governance* Dalam Pembangunan

Partisipasi masyarakat terhadap pembangunan jelas terlihat bahwa dalam pelaksanaannya terdapat korelasi antara variabel bebas dengan variabel keberhasilan pembangunan untuk mencapai *good governance*. Aktivitas pembangunan yang dijalankan selama ini adalah adanya dukungan fasilitas pelaksanaan fungsi dan tugas aparat. Dengan demikian, fasilitas yang dimiliki aparat pemerintah setempat dalam pembangunan berdasarkan jenis dan volume. Jenis aktivitas yang dilakukan meliputi aktivitas kesekertarian, opservasi atau penelitian dan aktivitas yang berhubungan dengan media massa, berdasarkan aktivitas tersebut maka jenis fasilitas yang dimiliki meliputi perkantoran, perangkat mobil, alat-alat publisitas, perangkat pengarsipan serta perangkat untuk kenyamanan kerja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang menjadi responden dalam penelitian yang menyatakan bahwa adanya faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap pemabangunan dapat

mempengaruhi keberhasilan didalam menentukan tujuan. Partisipasi masyarakat terhadap pembangunan dalam mewujudkan *good governance*, sifat yang berdasar pada faktor kiranya dapat mendukung suatu keberhasilan program kegiatan pelaksanaan pembangunan namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat kerhasilan program. Indikator yang digunakan dalam penerapan *good governance* dalam pemabangunan adalah (1) memiliki suara dalam pembuatan keputusan, (2) adanya kepastian hukum, (3) dibangun atas dasar kebebasan informasi, (4) penyelenggaraan pemerintahan yang melayani dan (5) kepentingan untuk memperoleh pemilihan yang baik.

Mewujudkan tujuan program pembangunan pada setiap lembaga dibutuhkan suatu pola manajerial dalam pengelolaan pembangunan, pola manajerial tersebut dimaksudkan agar hasil pembangunan dan program-program pemerintahan lainnya dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat. Berdasarkan hal di atas berbagai hal diusahakan oleh pemerintah Kecamatan yaitu: penyediaan bantuan menunjang kegiatan masyarakat, perumusan kebijakan yang dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk

turut serta dalam program pelaksanaan pembangunan, pemberian kreatifitas dan motivasi bagi tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan. berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian maka partisipasi masyarakat terhadap pembangunan Daerah belum berjalan dengan efektif, hal tersebut dikarenakan adanya berbagai pihak yang tidak ikut dalam program kebijakan pemerintah.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan dalam mewujudkan *good governance* di Desa Ko`mara Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar yaitu dengan memberikan sumbangan pemikiran, ikut merumuskan kebijakan, bermusyawarah, keterlibatan masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan. penerapan *good governance* dalam pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Ko`mara Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar yaitu pada dasarnya dapat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan agar kiranya dapat mendukung suatu keberhasilan program

kegiatan pelaksanaan pembangunan namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat program pembangunan yang serasi antara pemerintah dengan masyarakat agar tujuan yang dikehendaki dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriana, H., & Putubasai, E. (2021). Analisis Good Governance Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi di Kecamatan Telukbetung Barat Kota Bandar Lampung. *Jurnal Sosial dan Humanis Sains (JSHS)*, 6(1), 61-80.
- Duadji, N. (2012). Good Governance dalam Pemerintah Daerah. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 28(2), 201-209.
- Hendrawati, E., & Pramudianti, M. (2020). Partisipasi, Transparansi Dan Akuntabilitas Perencanaan Dan Penganggaran Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 12(2), 100-108.
- Kuncoro, A. (2015). Pemberdayaan Perempuan Pesisir Pengaruhnya Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Nelayan Sambiroto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati. *Buletin Ekonomi*, 13(1), 87-96.
- Maleke, I. T. (2019). Kewenangan Pelayanan Dibidang Pertanahan dalam Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah. *LEX ADMINISTRATUM*, 6(3).
- Nasution, I. B. (2020). Good Governance Dalam Mewujudkan Negara Hukum. *Citra Justicia: Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 21(1), 1-8.
- Suryadi, A. M., & Sufi, S. (2019). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Nelayan (Studi di Kantor Camat Muara Batu Kabupaten Aceh Utara). *Negotium: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 2(2), 118-140.

- Umar, H. (2011). Peran akuntan dalam pemberantasan korupsi. *Sosiohumaniora*, 13(1), 108.
- Zakiah, U. (2018). Partisipasi Setengah Hati Dalam Pelaksanaan *Good Governance* Pada Pemerintah Desa. *Journal of Government (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, 4(1), 58-70.